

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang disiplin ilmu sosial, yakni geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, dan lain-lainnya. Secara historis sebutan IPS sebagai mata pelajaran digunakan untuk tingkat pendidikan dasar (Sekolah Dasar/ SD) dan menengah (Sekolah Menengah Pertama/ SMP dan Sekolah Menengah Atas/ SMA) yang muncul bersamaan dengan diberlakukannya kurikulum 1975. Untuk tingkat SD dan SMP, substansi mata pelajaran merupakan IPS terpadu, sekarang, dalam kurikulum 2013 disajikan secara tematik (SD). Sementara itu pada SMA disajikan secara terpisah tanpa dikaitkan dengan disiplin ilmu yang lain. Meskipun demikian pengajaran sejarah di setiap jenjang tersebut mengandung tugas untuk menanamkan semangat berbangsa dan bertanah air. Dalam pendidikan IPS, sejarah termasuk salah satu di antara ilmu-ilmu sosial yang ikut bertanggung jawab terhadap pembentukan warga negara yang baik. Tampaknya, pembelajaran sejarah belum memperlihatkan peranannya yang optimal dalam membentuk warga negara yang baik. Kurang optimalnya pembelajaran sejarah dalam menjalankan perannya antara lain disebabkan berbagai faktor, seperti: konten kurikulum; kurang memanfaatkan sumber belajar, strategi, pendekatan, metode pembelajarannya yang kurang bervariasi, dan lebih didominasi metode ceramah (*expository*). Begitu pula pengembangan model evaluasi yang berorientasi pada hasil sehingga mengabaikan proses, pemanfaatan sumber belajar yang mengandalkan buku teks dan LKS (Lembar Kerja Siswa), serta guru sebagai sumber pengetahuan utama siswa.

Sejarah merupakan disiplin ilmu yang penting, akan tetapi sebagian kalangan dipahami bukan sebagai ilmu sosial yang sesungguhnya karena proses keilmuannya lebih dekat dengan humaniora. Meskipun demikian pembelajaran sejarah sangat perlu menghubungkan atau mengaitkan antara pengalaman masa lampau dengan persoalan kehidupan kompleks kekinian. Materi dalam pembelajaran sejarah yang menjelaskan perjuangan manusia di masa lalu harus

memiliki potensi untuk dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan masa kini agar lebih bermakna. Banyak orang termasuk guru mempercayai bahwa pembelajaran sejarah dapat berkontribusi secara langsung untuk mencapai tujuan yang luas terhadap pendidikan kewarganegaraan (*citizenship education*), dengan demikian sejarah nasional wajib diajarkan (Jarolimek, 1986, hlm. 146).

Ada banyak nilai yang dapat ditanamkan dalam pembelajaran sejarah, antara lain: nilai informatif, nilai pendidikan, nilai budaya, nilai etika, nilai nasionalisme, dan sebagainya. Nilai-nilai di atas merupakan sumber pembelajaran sejarah yang dapat dikembangkan serta ditingkatkan pada diri siswa di berbagai jenjang pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan merupakan wahana yang tepat dan strategis dalam menanamkannya, sedangkan sekolah adalah tempat untuk mengembangkan nilai-nilai tersebut (Wiriaatmadja, 2002, hlm. 156). Sementara itu, sejarah dapat memberikan nilai positif karena menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mengenal masa lalu. Selain itu salah satu fungsi penting dari sejarah adalah pengabdian pengalaman masyarakat masa lampau yang sewaktu-waktu dapat membantu pemecahan masalah. Sejarah sendiri menyangkut persoalan kesinambungan dan perubahan. Banyak pelajaran yang diperoleh dari pembelajaran sejarah sehingga tidak ingin mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat pada masa lalu, sedangkan keberhasilan tentu perlu dicontoh dan kalau bisa ditingkatkan lagi (Wineburg, 2006, hlm. vii).

Menjelang akhir abad XX, Indonesia menghadapi masa yang sangat berat, suatu ujian bagi kelanjutan integrasi nasional. Pertikaian antara etnik, antara suku, antara golongan, ataupun antara agama mewarnai kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh konflik di Sambas-Kalimantan antara Dayak dan Madura, konflik di Poso-Sulawesi antara kelompok Muslim dan non-Muslim, di Lampung antara penduduk dengan pemilik perkebunan, perkelahian baik antar kampung maupun antara pelajar, dan sebagainya. Perkembangan yang menggejala dan cukup mengkhawatirkan berbagai pihak ini menunjukkan kurang berfungsinya rasa nasionalisme sebagai pemersatu bangsa. Rasa nasionalisme di masa penjajahan dapat berfungsi sebagai ideologi yang mengintegrasikan berbagai golongan etnis dan berbagai komponen dalam masyarakat, kini memudar dan cenderung kehilangan fungsinya. Sebaliknya, etnisitas dan religiusitas yang

sempit semakin menguat, yang direfleksikan oleh perilaku moral yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yang beradab.

Pendidikan nilai yang diabaikan dapat berdampak negatif terhadap perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari seperti tersebut di atas. Perilaku-perilaku yang menyimpang ini mengindikasikan bahwa telah terjadi kemerosotan nilai dan moral dalam masyarakat yang semakin meluas. Salah satu cara yang paling efektif mengurai masalah tersebut adalah dengan menerapkan pendidikan tentang nilai di sekolah-sekolah melalui pembelajaran sejarah, sebagai alternatif yang bersifat preventif. Pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai masa lampau diharapkan akan menumbuhkan kemampuan dan kearifan untuk menghadapi kehidupan yang sedang dijalani. Dalam hal ini memahami sejarah tidak hanya mengetahui peristiwa yang sudah terjadi, akan tetapi mengetahui kemampuan membuat proyeksi agar tidak terjadi kesalahan. Belajar sejarah merupakan cara atau jalan menjadikan bijaksana sebelum kejadian berlangsung, yang sering disebut sebagai belajar dari sejarah (Sjamsuddin, 2012, hlm. 285). Bekal yang diperlukan dari pembelajaran sejarah adalah belajar dengan berorientasi kepada pengembangan potensi berpikir siswa, yang menyentuh emosinya dalam hubungannya antar manusia, menyadarkan dirinya akan bangsa dan tanah air. Selain itu, menghargai keanekaragaman bangsa-bangsa dan kebudayaan-kebudayaan yang ada dalam melengkapkan kemanusiaannya (Wiriaatmadja, 2002, hlm. 146).

Pembelajaran sejarah perlu menghubungkan dan mengaitkan antara pengalaman masa lampau masyarakat di lingkungan mereka dengan persoalan kehidupan kompleks kekinian dengan menggunakan konsep atau tema yang diambil dari disiplin ilmu sosial. Melihat peran pentingnya mata pelajaran sejarah, maka menjadi sebuah tanggung jawab dan tantangan yang besar untuk menumbuhkan serta meningkatkan kesadaran sejarah di kalangan generasi muda pada khususnya. Dari sini diharapkan mereka semakin objektif dalam menilai berbagai peristiwa sejarah, termasuk kemampuannya bersikap dan bertindak secara arif serta bijaksana ketika menghadapi fenomena yang ada. Hal tersebut diawali dengan keinginan mewariskan pengalaman masa lalu, baik menyangkut

kemenangan/ kejayaan maupun kekalahan/ kehancuran dari setiap peristiwa yang pernah dialami manusia dari masa ke masa. Hal tersebut merupakan pengetahuan yang berharga untuk menghadapi kehidupan yang terus berlanjut selain juga bagi pengembangan potensi berpikir siswa itu sendiri.

Sebagai salah satu mata pelajaran di tingkat pendidikan menengah atas, materi sejarah sebenarnya telah diberikan secara formal sejak dari pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai bagian dari ilmu pengetahuan sosial. Pada jenjang pendidikan di tingkat SMA, mata pelajaran sejarah diajarkan secara terpisah dan merupakan bagian dari kelompok wajib atau peminatan ilmu-ilmu sosial. Sejalan dengan tujuan IPS, semua memiliki tujuan yang sama (meskipun dengan derajat atau tingkatan yang berbeda), yakni membantu siswa atau anak-anak muda mengembangkan kemampuannya untuk membuat keputusan yang informatif dan masuk akal untuk kebaikan masyarakat sebagai warga negara dari kultur yang beragam (Maxim, 2010, hlm. 14). Berkaitan dengan hal tersebut, siswa dapat mengembangkan kecintaan, kesetiaan, ataupun ketaatan kepada negara melalui pengetahuan dan apresiasi dan pemahaman tentang perjuangan orang-orang yang berkontribusi dalam membangun bangsa yang besar dan kuat (Jarolimek, 1986, hlm. 146).

Mencermati uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan dilakukan suatu kajian yang dapat memperkaya materi sejarah lokal, dengan tema pokok revolusi nasional di tingkat lokal. Ada banyak materi sejarah lokal yang memiliki kontribusi dalam kaitan pembentukan negara kesatuan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Materi-materi sejarah lokal tersebut perlu dikaji (kembali) karena termasuk hal yang dapat mengatasi persoalan materi sejarah (nasional). Pada penelitian ini penulis akan melakukan kajian kembali tentang peranan Yogyakarta selama revolusi kemerdekaan tahun 1945-1950 sebagai *enrichment* di SMA.

Ruang lingkup materi sejarah lokal itu sangat luas, semua aspek kehidupan sehari-hari masyarakat yang dianggap penting dan menarik di lingkungan setempat dapat menjadi perhatiannya. Sementara itu bila dilihat dari sudut tema, maka kemungkinan bagi penulisan dan pengembangan materi sejarah lokal tidak kalah menarik dan sangat terbuka dengan tema pokok seperti: dinamika masyarakat pedesaan; pendidikan sebagai faktor dinamisasi dan interaksi sosial;

interaksi antar suku bangsa dalam masyarakat majemuk; serta biografi tokoh lokal. Pemberian kesempatan yang sangat luas kepada peserta didik atau siswa untuk mengembangkan pembelajaran sejarah lokal yang berceritera kehidupan lingkungan sekitar siswa yang tentunya tidak semata-mata berkaitan dengan aspek politik saja (Supardan, 2004, hlm. 3).

Berdasarkan uraian di atas, maka kemungkinan untuk menuliskan atau mengembangkan materi sejarah lokal sangat terbuka, bahkan hampir tak terbatas. Dalam hal ini berarti tidak harus merupakan suatu peristiwa sejarah formal, yang tercatat dan dikenal secara nasional, namun tetap harus ada bukti atau sumber apapun jenisnya (lisan, tertulis, dan sumber benda). Apa yang pernah dilakukan dan dialami oleh masyarakat tersebut dapat menjadi pengetahuan berharga, yang bagi pendidikan sejarah diperlukan dalam membangun berbagai nilai positif pada diri siswa. Dilihat dari sudut wilayah ‘kelokalan’ yang menunjukkan tempat atau aspek geografis dapat menyangkut desa, kota, kecamatan, bahkan provinsi dengan berbagai variasinya Negara Indonesia sangat banyak jumlahnya. Pembelajaran sejarah lokal akan terasa lebih mudah dihayati karena materinya menyangkut kejadian penting yang dialami secara langsung oleh lingkungan. Dengan kata lain, siswa diajak ke situasi nyata tentang masa lalu.

Pengajaran sejarah di sekolah bagaimana pun akan memperkenalkan siswa kepada pengalaman kolektif dan masa lalu bangsanya. Selanjutnya, akan membangkitkan kesadaran dalam kaitannya dengan kehidupan bersama dalam komunitas yang lebih besar. Dengan menfokuskan pada peranan Yogyakarta sebagai pusat integrasi bangsa Indonesia selama revolusi kemerdekaan tahun 1945-1950 untuk materi pembelajaran sejarah di jenjang pendidikan menengah atas, tentunya banyak nilai-nilai kehidupan yang dapat dipetik dari masa lalu (materi sejarah) tersebut. Nantinya pembelajaran sejarah diharapkan dapat membantu siswa dalam mempelajari subjek secara mandiri sehingga menciptakan pembelajaran sejarah yang menarik. Hanya saja di jenjang persekolahan masih ditemui bahwa materi sejarahnya banyak memuat ceritra yang sifatnya faktual, sehingga siswa terbenam dalam lautan fakta (angka tahun, nama pelaku, tempat kejadian, dan nama peristiwa). Dengan kata lain, sedikit mengandung peristiwa yang dapat dikaji dan memiliki makna untuk diambil pelajarannya. Kondisi

demikian harus segera diperbaiki, perlu adanya kesadaran untuk meningkatkan mutu materi pembelajaran sejarah, termasuk dalam hal penyajian atau historiografinya. Materi dan topik sejarah yang dipilih harus dapat memberikan kebermanfaatan yang lebih kepada siswa dan guru, walaupun kebenaran yang ada tetap berdasarkan kaidah keilmuan yang berhadapan dengan kepentingan bangsa. Sejarah itu bukan sekadar nama dan tanggal, akan tetapi menyangkut penilaian, kepedulian, dan kewaspadaan atau kehati-hatian.

Beberapa buku pelajaran (teks) sejarah untuk SMA yang peneliti lihat ditinjau dari isinya menunjukkan, materi yang terkandung di dalamnya pada dasarnya lebih merupakan ringkasan dari buku Sejarah Nasional Indonesia. Berikutnya paparannya diuraikan dalam bentuk butir-butir yang kini disebut kompetensi inti (dulu standar kompetensi) dan dalam kompetensi dasar merupakan bagian dari kurikulum yang berlaku. Dalam hal ini penafsiran resmi dari pemerintah akan tetap memegang peran penting terutama terkait dengan materi sejarah politik (Mulyana, 2012, hlm. 28-29). Artinya, kepentingan politik pemerintah (kekuasaan) menentukan faktor pemilihan peristiwa sejarah yang dijadikan bahan kajian beserta dengan penafsiran resminya terhadap peristiwa yang bersangkutan. Banyak fakta sejarah, seperti: tahun-tahun, nama-nama tempat, nama-nama pelaku, dan nama-nama peristiwa yang disodorkan dan harus dipelajari oleh siswa sehingga besar kemungkinan menjadi tidak menarik atau membosankan bagi siswa.

Uraian lebih jelas dapat dilihat pada buku teks sejarah yang digunakan oleh siswa SMA. *Pertama*, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014) yang berjudul 'Sejarah Indonesia Kelas XI, semester 2', yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku ini menjelaskan peranan Yogyakarta selama revolusi kemerdekaan tahun 1945-1950 yang kurang banyak disinggung dan kurang detail diuraikan. Dengan kata lain, tidak cukup memberikan gambaran tentang berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah ini pada masa revolusi kemerdekaan. Berkaitan dengan masa tersebut, buku teks ini menjelaskannya pada bab 6 bagian B yang diberi judul 'Mengevaluasi Perjuangan Bangsa: Antara Perang dan Damai'. Peristiwa yang bersifat nasional, seperti Perjanjian Linggarjati, Agresi Belanda I dan II, Perjanjian Renville, Roem-Royen

dan Konferensi Meja Bundar telah diuraikan dengan cukup baik, menyangkut waktu, tempat, dan peranan dari pelaku di masing-masing peristiwa tersebut, beserta kronologisnya. Sementara itu yang terkait dengan peristiwa yang berlangsung di Yogyakarta hanya disinggung secara garis besarnya, rata-rata diuraikan antara setengah halaman sampai dua halaman. Peristiwa yang dimaksud, antara lain: perang gerilya, serangan umum 1 Maret 1949, peristiwa Yogya kembali, Konferensi Inter Indonesia, pembentukan RIS, atau peristiwa penyerahan dan pengakuan kedaulatan. Untuk tokoh setempat, relatif lebih banyak disebutkan peran Sri Sultan HB IX dibandingkan dengan Pakualam VIII, yang hanya dikaitkan dengan Amanat 5 September 1945 pada bab 5 bagian B, yakni menganalisis terbentuknya NKRI. Menyangkut peran masyarakat Yogyakarta pada umumnya, dapat dikatakan tidak diuraikan secara eksplisit dalam buku teks ini. Fakta-fakta tersebut baru sebagian memberikan gambaran tentang dinamika yang terjadi di Yogyakarta selama revolusi kemerdekaan. Masih banyak hal yang belum cukup dihadirkan dalam buku ini. Tentang pemerintahan transisi yang pernah berlangsung selama beberapa bulan di Yogyakarta, terlewatkan, sama-sama sekali juga tidak disinggung dalam buku teks ini.

*Kedua*, buku teks yang disusun oleh Ratna Hapsari dan M. Adil (2014) dengan judul ‘Sejarah Indonesia untuk SMA/MA kelas XI’ diterbitkan oleh Penerbit Erlangga. Adapun yang dijelaskan menyangkut peristiwa: ‘Kedatangan Sekutu Serta Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan’ berisi penjelasan pertama tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata, meliputi: pertempuran Medan Area; pertempuran Ambarawa; pertempuran Surabaya; peristiwa Merah-Putih di Manado; pertempuran di Bandung; pertempuran Margarana atau puputan Margarana; dan peristiwa Westerling di Makasar. Kedua, tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui strategi diplomasi berisi, antara lain: perundingan Linggarjati; Komisi Tiga Negara; Perjanjian Renville; Perjanjian Roem-Royen; Konferensi Inter Indonesia; Konferensi Meja Bundar, dan penyerahan kedaulatan’. Sementara itu peristiwa yang terjadi di Yogyakarta selama revolusi kemerdekaan tahun 1945-1950 disinggung sedikit atau terbatas, antara lain: tentang penangkapan pemimpin Indonesia oleh Belanda; perang gerilya yang

dipimpin oleh Jenderal Soedirman; sedangkan serangan umum 1 Maret 1949, relatif cukup banyak dijelaskan, yakni sekitar satu halaman dibandingkan dengan yang lain. Untuk tokoh setempat (lokal), disebutkan dan diuraikan tentang peranan Sri Sultan HB XI, sedangkan masyarakat Yogyakarta secara umum tidak disebutkan atau dijelaskan. Fakta-fakta tersebut baru sebagian memberikan gambaran tentang peristiwa yang berlangsung di Yogyakarta selama revolusi kemerdekaan. Selain itu, sama dengan buku teks pertama, keberadaan pemerintahan transisi yang berpusat di Yogyakarta tidak disinggung sama sekali.

*Ketiga*, buku yang ditulis oleh Nana Supriatna (2014) '*Indonesian History 2*', penerbit Grafindo, di dalam Unit 4 yang diberi judul 'Perjuangan Bangsa Indonesia Mempertahankan Kemerdekaan' memperlihatkan keterkaitan dengan peristiwa revolusi kemerdekaan, termasuk yang berlangsung di Yogyakarta. Buku tersebut menjelaskan tentang perkembangan masyarakat Indonesia pasca proklamasi; perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan Indonesia; dan perjuangan diplomasi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada buku ini pembahasan yang berkaitan dengan Yogyakarta, meliputi: Amanat 5 September 1945 dari Sultan HB IX dan peristiwa *Long March* tentara Siliwangi; Agresi Belanda II terkait dengan serangan atas ibu kota RI Yogyakarta; peristiwa yang terjadi di sekitar Lapangan terbang Maguwo; peristiwa penangkapan para pemimpin RI; perjuangan Jenderal Soedirman; Serangan Umum I Maret 1949; dan berbagai upaya diplomasi yang dilakukan RI dengan Belanda. Tokoh lokal setempat tidak banyak disebutkan kecuali Sultan HB IX dan Pakualam VIII, sedangkan peran rakyat di Yogyakarta pada umumnya tidak diuraikan secara eksplisit. Begitu juga tentang keberadaan pemerintahan transisi yang berpusat di Yogyakarta tidak diuraikan dalam buku ketiga ini. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa materi sejarah yang diuraikan belum memberikan sepenuhnya gambaran tentang dinamika yang terjadi di Yogyakarta selama revolusi kemerdekaan. Secara keseluruhan penjelasan tentang peranan Yogyakarta pada masa revolusi kemerdekaan yang terdapat dalam buku ini baru sebagian dihadirkan.

Bila dihubungkan dengan masalah keluasan, maka materi dalam buku-buku teks tersebut dapat dikatakan relatif telah memadai sebagai bahan ajar yang harus dikuasai siswa SMA kelas XI, meskipun, buku tersebut hanya memberikan



gambaran secara garis besarnya saja. Selain itu, materinya juga telah dipaparkan secara kronologis, dari sejak Indonesia merdeka hingga pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Sayangnya, menurut peneliti, tentang peranan Yogyakarta selama revolusi kemerdekaan belumlah dipaparkan secara proposional, termasuk keberadaan pemerintahan transisi di Yogyakarta yang tidak diuraikan sama sekali. Hal ini bila dikaitkan dengan realita yang terjadi dapat dikatakan bahwa tanpa peran Yogyakarta tampaknya NKRI akan mengalami kesulitan dalam memperjuangkan eksistensinya. Hal seperti ini diketahui ketika sebagian besar wilayah RI berada di bawah tekanan Belanda, maka Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang tetap mengadakan perlawanan secara maksimal. Dalam buku teks di atas, untuk masalah pemaparannya disampaikan dalam bentuk deskriptif-naratif, dengan menggunakan bahasa yang cukup mudah dicerna, begitu juga teknik yang dipakai (aspek estetika, teknik penulisan, dll.) telah memadai sebagai buku teks untuk siswa SMA. Hanya jumlah halamannya yang menurut peneliti masih perlu diperhatikan karena masih ada banyak hal yang belum cukup dihadirkan dalam buku tersebut, khususnya terkait dengan peranan Yogyakarta selama revolusi kemerdekaan.

Menyangkut masalah kedalaman, isi materi buku-buku teks di atas telah menghadirkan sederet fakta, baik yang menyangkut waktu, tempat, nama peristiwa maupun pelakunya. Namun demikian baru sebagian memberikan gambaran tentang peristiwa yang berlangsung di Yogyakarta selama revolusi kemerdekaan. Untuk fakta yang menyangkut waktu dan tempat, buku-buku teks di atas memang telah menyebutkan dengan jelas hal-hal yang menyangkut peristiwa besar atau yang bersifat nasional. Di sisi lain, kurang detail bila menyangkut hal-hal yang terjadi di tempat-tempat tertentu (lokal), termasuk yang terjadi di Yogyakarta selama revolusi kemerdekaan. Oleh sebab itu, cukup banyak detail tentang waktu dan tempat di Yogyakarta yang terlewat begitu saja. Tidak jauh berbeda dengan fakta yang menyangkut tentang pelaku, umumnya hanya disebutkan tokoh-tokoh yang memiliki peranan secara nasional, sedangkan pelaku dari kalangan biasa tidak mendapatkan tempat dalam buku teks. Keberadaan gambar dalam buku-buku teks di atas sangatlah membantu siswa dalam memahami ceritera secara utuh. Gambar di sini dapat berupa grafik, peta,

diagram, sketsa, bagan, atau sajian gambar lain, bisa dimaksudkan untuk menekankan hubungan hal tertentu yang signifikan (Muslich, 2010, hlm. 231). Sayangnya, tidak ada yang menyajikan tabel yang sebetulnya dapat membantu penyajian verbal, melalui tabel, siswa akan lebih mudah memahami dan menafsirkan data secara cepat termasuk mencari hubungan antar bagian.

Bagaimana pun juga buku pelajaran sejarah atau buku-buku teks tersebut merupakan salah satu komponen dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang perlu dipahami adalah buku teks merupakan sarana untuk mencapai tujuan pengajaran. Dengan kata lain, buku teks tersebut merupakan sarana belajar baik bagi siswa maupun sarana mengajar bagi seorang guru. Meskipun, sebagian besar isinya lebih menekankan kepada aspek kognitif atau kecerdasan intelektual, dan kurang menyentuh hal-hal yang bersifat emosional yang mampu menggugah baik potensi sosial maupun spiritual siswa. Namun dalam beberapa hal, buku-buku di atas telah menguraikan sedikit tentang nilai-nilai kehidupan. Hal ini kemudian menyebabkan buku-buku pelajaran/ teks tidak terlalu menarik karena hanya menekankan pada penguasaan materi (esensialisme). Pada kenyataannya memang tidak ada satu pun buku teks yang ampuh untuk semua situasi dan kondisi. Namun demikian, keterbatasan ini tidak boleh dipakai sebagai ‘kambing hitam’ untuk tidak menggunakan buku teks (Muslich, 2010, hlm. 33). Tidak ada buku teks yang betul-betul bisa memenuhi harapan kurikulum secara total karena buku teks hanyalah salah satu sarana, bukan satu-satunya sarana untuk memenuhi kebutuhan kurikulum.

Walaupun silabus pada kurikulum tertentu dipakai sebagai acuan penyusunan materi atau bahan ajar pada buku teks, akan tetapi tidak bisa menjamin bahwa hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan kurikulum secara total. Namun di sebagian besar lingkungan siswa ataupun guru, buku teks kerap menjadi patokan dan pegangan utama dalam mengikuti proses belajar mengajar. Buku teks akan berperan secara maksimal apabila memenuhi kriteria ideal dan diasimilasikan oleh guru yang profesional. Sementara itu, dapat dikatakan tidak ada satu pun buku teks yang cocok untuk semua jenjang pendidikan. Buku teks memang disusun dengan mempertimbangkan program tertentu, jenjang pendidikan tertentu, dan pola pikir siswa tertentu.

Untuk itulah, peneliti mencoba menggali lebih dalam tentang peranan dari Yogyakarta selama periode revolusi kemerdekaan, yang sangat terbatas dikemukakan sebagai materi pembelajaran sejarah di jenjang pendidikan SMA. Pembahasan tentang keberadaan Yogyakarta sebagai ibukota RI dan peranannya selama revolusi kemerdekaan masih kurang disinggung. Tidak mungkin mengesampingkan peranannya karena pada waktu itu Yogyakarta merupakan wilayah RI yang dengan tegas tetap setia pada cita-cita proklamasi. Bahkan, sesudah Serangan Umum 1 Maret 1949 hingga menjelang pengakuan kedaulatan, Yogyakarta menjadi saksi dari adanya suatu peristiwa yang dinamakan Pemerintahan Transisi atau Masa Peralihan yang belum banyak diungkap dalam berbagai tulisan yang berhubungan dengan periode tersebut. Pemerintahan ini dipimpin oleh Menteri Negara Koordinator Keamanan yang pada waktu itu dijabat Sri Sultan Hamengku Buwono IX, berdasarkan Surat Penetapan Presiden, Manumbing pada 1 Mei 1949.

Berbicara tentang masa revolusi kemerdekaan Indonesia mau tidak mau harus memaparkan juga dinamika yang berlangsung di Yogyakarta, sehingga menjadi ceritra yang utuh dari perjalanan bangsa ini dalam mempertahankan kedaulatan. Sementara itu periode tersebut dapat dimaknai sebagai suatu pengalaman ‘buruk’ yang nyaris akan menghancurkan keutuhan dan kelangsungan berdirinya NKRI. Peristiwa ini menjadi pelajaran bersama bagi bangsa Indonesia, jika melihat fenomena sekarang, banyak dijumpai konflik saudara yang dapat memicu persoalan besar dan akan mengganggu kebersamaan sebagai suatu keluarga. Peristiwanya berlangsung secara singkat dan di tempat terbatas, akan tetapi sangat menentukan keberlangsungan NKRI sebagai pusat daya pemersatu bagi terwujudnya kembali integrasi bangsa Indonesia. Salah satu masalah dalam rangka persatuan dan kesatuan Indonesia adalah proses integrasi berkaitan dengan penggabungan diri penduduk yang mendiami wilayah bekas jajahan Belanda ini sebagai bangsa dan negara Indonesia memang membutuhkan waktu.

Awal kehidupan RI ditandai dengan suasana pergolakan yang disebabkan oleh sikap dari Belanda yang bersikeras ingin berkuasa kembali meskipun dengan melalui berbagai pertempuran dan diplomasi. Empat tahun pertama masa revolusi

kemerdekaan didominasi oleh berbagai peperangan melawan kekuatan Belanda, dimaknai sebagai perjuangan bagi hidup matinya republik yang baru saja berdiri sejak 17 Agustus 1945 (Ricklefs, 2008, hlm. 446-493). Terjadi tarik ulur antara kelompok unitarisme dengan kelompok federalisme, menandai adanya ketidaksepakatan yang mengarah kepada pertikaian dalam negeri atau disintegrasi dalam menentukan nasib negara Indonesia. Meskipun sebenarnya sejak peristiwa Sumpah Pemuda sampai Proklamasi pembinaaan persatuan dan kesatuan bangsa terus diupayakan, bahkan dalam kehidupan sekarang tetap menjadi agenda penting dari pemerintah.

Pada masa tersebut masalah persaingan antara kekuatan unitarisme dengan federalisme atau antara golongan republiken dengan federalis mewarnai pertikaian atau konflik, yang intinya telah memecah belah persatuan. Bahkan terjadi pertumpahan darah di antara bangsa Indonesia sendiri, satu pihak tetap setia kepada RI, sedangkan yang lainnya berpihak kepada keinginan Belanda. Peristiwa ini memberikan pelajaran sangat berharga karena perjuangan panjang untuk memperoleh kemerdekaan segera terkoyak. Berbagai peristiwa politik dan militer berlangsung silih berganti dengan diplomasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni Republik Indonesia yang unitaris dengan negara-negara federalis. Sejarah Indonesia mencatat peristiwa berdirinya Republik Indonesia Serikat merupakan persoalan serius yang pernah dialami bangsa ini karena memperlihatkan ketidakkompakan, sehingga Belanda mudah mempengaruhi beberapa pemimpin daerah. Memang sejarah sebuah bangsa tidak hanya dihiasi oleh catatan mengenai keberhasilan semata. Sebaliknya, kenyataan objektif juga menunjukkan berisi lembaran-lembaran yang diliputi oleh tantangan, kelemahan, dan mungkin juga kegagalan, ataupun hambatan.

Sejarah revolusi Indonesia yang berkaitan dengan peristiwa revolusi fisik di Yogyakarta pada kenyataannya belum disampaikan secara proposional sebagai materi ajar kepada siswa di tingkat persekolahan. Sementara itu, selama revolusi kemerdekaan peran Yogyakarta sangat penting sebagai pusat perjuangan. Di samping juga sebagai salah satu wilayah yang tetap setia mendukung keberadaan pemerintahan RI. Seandainya Yogyakarta tidak bergabung dengan RI dan tetap bertahan sebagai negara sendiri karena telah memenuhi persyaratannya seperti

adanya: wilayah, rakyat, dan sistem pemerintahan, maka perjalanan sejarah Indonesia juga akan berbeda.

Sebagaimana diketahui ketika RI merdeka, Yogyakarta bertekad memutuskan untuk memilih bergabung daripada menjadi sebuah negara yang terpisah dari republik. Pemerintah pusat segera merespon sikap di atas dengan membuat surat penetapan mengenai kedudukan Yogyakarta dalam lingkungan RI dan kepercayaan pemerintah kepada Sri Sultan HB IX serta Pake Alam VIII. Sejarah masa depan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa yang terjadi di Yogyakarta karena telah menyatukan kembali NKRI sebagai episentrum daya sentripetal integrasi bangsa selama revolusi kemerdekaan, serta merupakan pilar penyangga bagi berdirinya Republik Indonesia.

Peranan penting dan besar selanjutnya dapat dilihat pada dukungan Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII serta penduduk Yogyakarta terhadap perjuangan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan RI. Hal ini dikuatkan dengan dikeluarkannya Amanat dari Sultan HB IX pada tanggal 5 September 1945 yang intinya berisi pernyataan tentang Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari RI; hubungan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintahan pusat RI bersifat langsung dan bertanggungjawab langsung kepada presiden RI. Integrasi tersebut tidak berarti penyerahan total, akan tetapi merupakan komitmen, bukan merupakan sikap tunduk atau mengalah terhadap negara baru yang bernama Republik Indonesia. Hal ini terlihat jelas dengan pemberian Piagam Kedudukan kepada Sultan dan Paku Alam setelah Yogyakarta menyatakan bergabung dengan republik.

Sejak tahun 1946 tekanan-tekanan terhadap republik ataupun pihak Belanda mulai meningkat. Pada bulan Januari tahun itu juga pendudukan kembali Belanda atas Jakarta telah berjalan begitu jauh sehingga diputuskan untuk memindahkan pemerintahan RI ke Yogyakarta dan tetap menjadi ibukota selama masa revolusi sampai akhir tahun 1949 (Ricklefs, 2009, hlm. 462; Atmakusumah, 1982, hlm. 78). Dengan kepindahan tersebut peran penting Yogyakarta beserta seluruh penduduknya semakin tampak, mereka terlibat langsung dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan negara. Bahkan,

Sultan HB IX menjadi tokoh yang aktif sebagai salah satu unsur dalam pemerintahan RI.

Agresi militer Belanda I yang kemudian diikuti dengan perjanjian Renville di awal tahun 1948 merupakan puncak kemelut yang paling parah selama revolusi kemerdekaan (Nasution, 1978, hlm. 5). Akibatnya, daerah republik terasa sempit, terbatas pada Yogyakarta yang kemudian menjadi pusat tujuan pasukan TNI yang terpaksa hijrah dari daerah-daerah gerilya di Jawa Barat dan Jawa Timur. Sementara itu, wilayah Indonesia lainnya berada di bawah pengaruh Belanda melalui bentuk federasi, sehingga kepentingan-kepentingan kolonial mereka masih terwakili. Di Pulau Jawa dibentuk Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, dan Negara Madura, sedangkan di luar Jawa kekuasaan Belanda lebih kuat dengan dibentuknya Negara Indonesia Timur, dan Negara Borneo (Kalimantan), yang pada dasarnya adalah untuk ‘mengepung’ Yogyakarta, sebagai satu-satunya wilayah RI yang masih berdaulat penuh.

Para tokoh nasional, seperti Soekarno, Moh. Hatta, Sri Sultan HB IX, Sri Paku Alam VIII, Soeharto, Anak Agung Gede Agung, Soedirman, dll memiliki peran besar pada masa revolusi kemerdekaan ini. Meskipun demikian tidak ketinggalan peran yang dilakukan oleh penduduk Yogyakarta bersama-sama TNI yang luar biasa dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi penentu adanya pengakuan internasional atas tegaknya Republik Indonesia. Peristiwa tersebut termasuk salah satu peristiwa yang sangat penting selama revolusi, di mana Yogyakarta merupakan pusat daya sentripetal dalam mempersatukan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, dinamika yang terjadi di Yogyakarta selama masa revolusi dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga, yaitu sebagai pengingat dalam rangka upaya menjaga keutuhan NKRI sekarang ini.

Sikap yang ditunjukkan oleh para pemimpin dan seluruh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di Yogyakarta selama revolusi kemerdekaan menyebabkan Belanda tidak mempunyai peluang sedikit juga untuk menguasai Yogyakarta. Inilah yang memberikan kesempatan kepada bangsa ini menjadikan Yogyakarta sebagai pusat daya pemersatu bagi seluruh rakyat Indonesia agar terus berjuang melawan kekuatan Belanda. Termasuk dalam hal ini adalah memberikan

kontribusi yang sangat besar guna membangkitkan spirit bagi NKRI setelah sempat menjadi Negara Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 27 Desember 1949 berdasarkan hasil dari Konferensi Meja Bundar. Pada akhirnya dengan pindahnya ibukota RI kembali ke Jakarta peranan sentral dari Yogyakarta selama revolusi kemerdekaan telah usai. Namun demikian, Yogyakarta akan tetap akan tetap dikenang sebagai sebuah kota perjuangan dalam melindungi RI, bahkan dihantarkan hingga siap membangun bangsanya. Yogyakarta adalah inspirator bagi bangkitnya kebangsaan yang tidak sekedar merupakan peninggalan sejarah, akan tetapi kekuatan yang menginspirasi seluruh rakyat Indonesia untuk tetap menjaga kedaulatan negara. Meskipun relatif berlangsung sebentar, namun peristiwa ini sangat penting sebagai materi pembelajaran sejarah, dimana dinamika politik pada masa revolusi Indonesia yang diwarnai oleh konflik disintegrasi bangsa menarik untuk dicermati.

Konten sejarah yang dikemas dalam suatu cerita sejarah selalu ada pelaku sejarah, dapat seseorang, kelompok, masyarakat, atau keseluruhan bangsa. Ketika pelaku sejarah tersebut adalah kelompok masyarakat atau bangsa, maka selalu ada seseorang atau beberapa orang terpilih yang menjadi pemimpin. Pemimpin tersebut umumnya adalah mereka yang memiliki inisiatif menggerakkan sekelompok masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Berangkat dari kondisi tersebut menjadi suatu tantangan bagi peneliti untuk mengembangkan materi dari salah satu aspek peristiwa sejarah lokal sebagai sumber *enrichment* pembelajaran sejarah yang diharapkan dapat mendorong siswa berpikir reflektif serta tanggap akan berbagai permasalahan yang ada. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam proses melakukan penelitian ini didukung fakta-fakta historis yang cukup bervariasi, sehingga penjelasan yang ada nantinya dapat diwacanakan dengan kuat. Selain itu, penelitian ini juga merupakan upaya mengatasi permasalahan dominasi buku teks sebagai salah satu bahan ajar yang pada umumnya kurang memberikan penjelasan secara detail dan kurang melibatkan siswa untuk ikut terlibat aktif dalam memahami materinya. Tetap masih ada ruang untuk menuliskan topik tersebut bagi kepentingan siswa di tingkat SMA sebagai bahan tambahan atau pengayaan dengan berbagai sudut pandang yang berkaitan dengan tafsir peristiwa sejarah karena setiap pandangan dan pendapat dapat

dibenarkan menurut kaedah keilmuan. Topik tersebut dapat direkonstruksi kembali dengan menjelaskan secara lebih luas berbagai hal yang dianggap penting, baik menyangkut peran para tokoh, penduduk Yogyakarta, maupun unsur-unsur lainnya.

Mengingat peristiwa revolusi fisik di Yogyakarta yang berlangsung dari tahun 1945-1950 menjadi salah satu materi yang direkonstruksi untuk kepentingan pembelajaran sejarah bagi siswa pada jenjang SMA, maka akan sangat relevan apabila dijelaskan lebih lengkap tentang berbagai konsep sejarah untuk mempermudah mereka memahami fenomena yang terjadi di sekitarnya. Siswa akan dihadapkan pada konsep sejarah (progres, berkesinambungan, dan berubah) serta kisah sejarah yang multitafsir. Selain itu siswa juga akan melihat peristiwa sejarah dalam suatu kontinuitas waktu dan relevansinya dengan masa kini, serta masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan masa sekarang, seyogyanya guru dapat membantu siswa melihat masa lalu itu sebagai awal mula dari masalah-masalah penting yang tetap ada hingga kini, walaupun sebetulnya masa lalu itu tidak sama dengan masa kini. Oleh sebab itu, untuk menumbuhkan pemahaman tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui proses pembelajaran dengan menyajikan materi sejarah sebaik-baiknya. Hal lainnya yang tidak kalah penting dalam proses pembelajaran adalah bagaimana menyeimbangkan antara kegiatan penyampaian pengetahuan dengan peningkatan kualitas pembelajaran.

Berkaitan dengan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Secara substansi ditentukan dan dibutuhkan banyak faktor pendukung, di antaranya kualitas dan profesionalisme pengajar atau guru, kemampuan siswa, lingkungan belajar, media pembelajaran, atau sumber pembelajaran, salah satunya adalah buku, baik buku teks maupun buku tambahan. Tentang buku teks, dengan sedikit perkecualian tentunya, tidak dapat membuat siswa memahami sendiri, selain itu tidak memenuhi semua aspek pengetahuan yang kritis dan mungkin malah kekurangan detail yang berkaitan dengan referensi-referensi terbaru. Oleh karena itu, dibutuhkan bantuan penjelasan dari guru ataupun melalui buku-buku lain sebagai *enrichment* pembelajaran (sejarah). Buku pengayaan tersebut memberikan nilai tambah dalam pembelajaran sejarah karena dalam buku teks hanya menyampaikan peristiwa-peristiwa utama atau pokok saja.



Dalam pembelajaran sejarah, materi yang dikemas secara baik dapat membangkitkan kesadaran empatik di kalangan siswa, yaitu sikap simpati dan toleransi terhadap orang lain, serta membangkitkan kesadaran akan kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa. Pengetahuan tentang sejarah didukung oleh pengalaman yang nyata dalam praktek kewarnegaraan yang tidak terbantahkan dalam memberikan kontribusi untuk membantu anak-anak mengenali dirinya dengan latar belakang sejarah yang mereka miliki (Jarolimek, 1986, hlm. 146). Proses pengenalan diri inilah merupakan titik awal dari timbulnya rasa harga diri, kebersamaan, keterikatan, rasa memiliki, serta rasa bangga terhadap bangsa dan tanah airnya (Wiriaatmadja, 2002, hlm. 156). Sementara itu, di lapangan (sekolah-sekolah) masih menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran di kelas itu sendiri aktivitas guru lebih dominan dalam memberikan materi, sedangkan kegiatan siswa cenderung terbatas pada menghafal. Kalau yang diajarkan hanya menghafal tahun, tempat, dan nama, maka kemampuan siswa juga hanya sebatas itu. Ketika tidak dipelajari dengan sungguh-sungguh, maka hafalan tersebut mudah dilupakan karena tidak dilihat konteks peristiwanya. Oleh karena itu guru pada umumnya menggunakan buku teks sebagai bahan ajar yang materinya dipaparkan secara terbatas. Dengan demikian penelitian ini menekankan pada perluasan materi tentang salah satu episode di masa revolusi kemerdekaan tahun 1945-1950 yang terjadi di Yogyakarta bagi siswa SMA. Sebagai salah satu *enrichment* pembelajaran sejarah. Nantinya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas disbanding dengan yang tercatat dalam buku teks. Selain itu, dapat menyadarkan siswa akan adanya proses perubahan dan perkembangan masyarakat, yang akan menjelaskan jati diri bangsa di masa lalu, masa kini, dan masa depan ditengah-tengah perubahan dunia, melalui perluasan materi sejarah lokal.

Sudah menjadi keharusan bagi seorang guru agar mengeksplorasi berbagai macam sumber guna mendapatkan alat bantu yang tepat untuk mengajar atau melengkapi apa yang sudah disediakan di dalam buku teks (Kochhar, 2008, hlm. 160). Hal tersebut termasuk salah satu dari upaya guru untuk menambah informasi, memperluas konsep, serta untuk membangkitkan minat dari siswa terhadap mata pelajaran yang bersangkutan. Pembelajaran sejarah yang

dikembangkan untuk meningkatkan potensi berpikir siswa tidak hanya dengan cara menghafal hal-hal yang sifatnya faktual, seperti: apa, siapa, kapan, dan di mana. Pengalaman masa lampau akan lebih bermakna bila dipaparkan secara lebih mendalam menyangkut bagaimana dan mengapa dari sebuah peristiwa sejarah itu berlangsung, sehingga siswa dilatih dalam aspek kognitif yang lebih tinggi dari hanya sebatas pengetahuan faktual saja (Wiriaatmadja, 2002, hlm. 147). Meskipun demikian, di dalam kelas materi pelajaran yang dipelajari siswa harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penjelasan yang disampaikan oleh seorang guru diharapkan dapat diterima dengan baik sebagai pengetahuan baru. Tantangan bagi siswa terutama adalah keterbatasannya dalam membaca teks sejarah karena sejarah berhubungan dengan dokumen mengenai masa lampau. Tidak hanya sekedar membaca, akan tetapi dapat mengetahui isi teks tersebut dengan baik. Bagaimana pun juga membaca teks itu dapat dapat mendatangkan kearifan. Sementara itu, kearifan bukanlah sesuatu yang menjalar dari teks kepada peserta didik, melainkan sesuatu yang berkembang pada diri mereka dengan mempertanyakan teks (Wineburg, 2006, hlm. viii).

Hal yang paling esensial adalah bagaimana implementasi pembelajaran di sekolah mencapai hasil yang efektif, tentunya peran guru sebagai pendidik sangat penting agar dalam prosesnya berjalan baik dan berkualitas untuk menghadapi era globalisasi yang sedang berlangsung. Kemampuan guru mencari kaitan antara pengalaman masa lampau bangsa dengan persoalan kehidupan kompleks kekinian ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar (pembelajaran). Oleh karena itu, guru harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Salah satunya adalah bagaimana mengajarkan sejarah itu dengan pendekatan multidisiplin karena hanya dengan pendekatan inilah dapat dihadapi lebih baik persoalan kompleksitas sejarah. penggunaan konsep yang berasal dari disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya perlu dilakukan untuk memahami berbagai peristiwa, gagasan, dan fenomena kesejarahan, sehingga dapat membantu memberikan solusi dalam memecahkan masalah yang kemungkinan dihadapi masyarakat. Pembelajaran sejarah diharapkan dapat mempengaruhi terjadinya perubahan sikap dari peserta didik seperti yang menjadi tujuan belajar itu sendiri. Di sisi lain perlu disadari bahwa penulisan sejarah lokal di Indonesia masih

banyak menemui kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan langkanya sumber-sumber dan tenaga ahli yang memadai. Oleh sebab itu, pengorganisasian bahan menempati posisi yang sangat penting.

## **B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka muncul pertanyaan penelitian: Mengapa peristiwa masa revolusi fisik di Yogyakarta tahun 1945-1950 penting direkonstruksi kembali sebagai salah satu *enrichment* pembelajaran sejarah di Sekolah Menengah Atas?. Selanjutnya, rumusan tersebut di uraikan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana upaya dari bangsa Indonesia, khususnya mereka yang berada di Yogyakarta dalam mempertahankan kemerdekaan selama masa revolusi tahun 1945-1950?
2. Bagaimana kelayakan materi sejarah tentang peranan Yogyakarta dalam masa revolusi kemerdekaan tahun 1945-1950 dikembangkan sebagai *enrichment* pembelajaran sejarah bagi siswa di tingkat SMA?
3. Bagaimana relevansi pembelajaran sejarah tentang peranan Yogyakarta dalam masa revolusi kemerdekaan tahun 1945-1950 sebagai *enrichment* di SMA?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini terutama ditujukan untuk memperoleh penjelasan yang mendalam mengenai:

1. Pilihan Yogyakarta terhadap bentuk unitaris, sementara daya *sentrifugal* yang disintegratif begitu kuat selama revolusi kemerdekaan tahun 1945-1950. Selain itu, juga tentang dinamika perjuangan yang dilakukan baik melalui kekuatan fisik (pertempuran) maupun diplomasi oleh para pemimpin nasional dan lokal, serta perjuangan para penduduk pada umumnya di Yogyakarta. Nilai-nilai, seperti nasionalisme, patriotism, dan toleransi yang diharapkan akan menumbuhkan *sense of belonging* dan *sense of solidarity* yang diperlukan untuk membentuk identitas nasional mendapat perhatian pula.

2. Kelayakan materi sejarah dengan judul ‘upaya bangsa Indonesia (Yogyakarta) dalam kancah revolusi kemedekaan tahun 1945-1950’, dikembangkan sebagai *enrichment* pembelajaran sejarah bagi siswa di tingkat Sekolah Menengah Atas. Hal ini menyangkut keluasan atau cakupan materi secara keseluruhan dan kedalaman yang berkaitan dengan fakta-fakta sejarah, interpretasi, penjelasan, atau ekspose dari materi sejarah yang akan dikembangkan sebagai pengayaan atau *enrichment* pembelajaran sejarah.
3. Implementasi pembelajaran sejarah dengan judul materi upaya bangsa Indonesia (Yogyakarta) dalam kancah revolusi kemedekaan tahun 1945-1950, dilaksanakan di salah satu SMA Negeri di Yogyakarta. Hal ini dilakukan untuk melihat proses pembelajaran di kelas, dari sejak melakukan persiapan, pelaksanaan, sampai pengevaluasian. Pada akhirnya akan dilihat relevansi materi tersebut sebagai *enrichment* pembelajaran sejarah, yang diharapkan juga dapat dilaksanakan di banyak SMA unggulan lainnya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan di bidang ilmu: menghasilkan sebuah monografi/ historiografi hasil penelitian tentang peranan Yogyakarta selama revolusi kemerdekaan 1945-1950, yang akan diuraikan dengan judul ‘upaya bangsa Indonesia (Yogyakarta) dalam kancah revolusi kemedekaan tahun 1945-1950’. Sebagai materi ajar sejarah, historiografi ini diharapkan dapat menjadi salah satu *enrichment* pembelajaran sejarah bagi siswa SMA, terutama untuk siswa yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Selain itu, juga akan berguna di dalam membuat proyeksi penggunaan sejarah lokal berdimensi nasional sebagai wahana pendidikan dalam membina semangat kebangsaan dan identitas diri siswa. Selanjutnya, akan muncul penelitian-penelitian sejenis dengan mengkaji sejarah lokal dari berbagai wilayah di Indonesia untuk memperluas pemahaman dalam pembinaan kebangsaan dan identitas diri siswa di masing-masing tempat. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai peristiwa yang dikategorikan ke dalam sejarah lokal, yang tersebar atau tersimpan di berbagai

tempat dalam rentangan waktu yang cukup panjang. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan penelitian dengan mengambil berbagai bahan dari peristiwa sejarah lokal yang dikembangkan bagi keperluan pendidikan, khususnya di tingkat sekolah menengah.

Kegunaan praktis: dilaksanakannya pengajaran sejarah dengan materi tentang Yogyakarta pada masa revolusi kemerdekaan dari tahun 1945-1950 di kelas, mudah-mudahan berguna untuk dijadikan bahan masukan di dalam upaya pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas. Pengajaran sejarah dengan materi sejarah lokal berdimensi nasional yang dipilih dan akhirnya dipaparkan secara tepat, diharapkan dapat membantu siswa di dalam proses mengenal diri dan bangsanya. Selain itu, studi ini berguna bagi institusi UPI dan Departemen Pendidikan Sejarah pada khususnya dalam mempersiapkan profesionalisasi calon guru sejarah agar lebih terbuka dalam memilih atau menggunakan sumber belajar yang begitu banyak untuk memperkaya wawasannya. Sementara itu, di lapangan di Sekolah Menengah Atas, penelitian ini dapat dimaknai sebagai masukan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Bagi para guru sejarah sendiri, selain dituntut menguasai bahan/ materi sejarah juga sangat diharapkan memiliki cakrawala yang luas dalam kaitannya memilih bahan bacaan tambahan/ pengayaan guna meningkatkan kualitas pembelajarannya. Dengan harapan-harapan tersebut di atas, maka kiranya dapat berguna sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan di bidang pendidikan dan bermanfaat bagi guru sejarah di lapangan pada khususnya.

### **E. Struktur Organisasi Disertasi**

Pada bab I ‘Pendahuluan’, akan diuraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Pada sub bab latar belakang antara lain digambarkan berbagai hal yang mendorong penulis tertarik dan akhirnya berencana melakukan penelitian ini.

Pada Bab II ‘Kajian Kepustakaan’ diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan kajian teoretis, dan kajian empiris. Dalam hal ini dijelaskan antara lain konsep tentang: IPS, konsep sejarah lokal, konsep *enrichment*/ pengayaan, nasionalisme,

patriotisme dan toleransi. Berikutnya pada kajian terdahulu akan dikaji hasil-hasil penelitian (disertasi) yang penulis anggap relevan dengan penelitian ini. Semuanya merupakan referensi yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini.

Pada Bab III ‘Metode Penelitian’ secara garis besar akan diuraikan tentang metode penelitian yang terkait dengan penelitian kualitatif. Dalam bab ini dijelaskan mengenai subjek dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi/ arsip), teknik analisis (reduksi, display, verifikasi, dan kesimpulan), serta alur penelitian. Dalam menghasilkan historiografi, sebagai pengembangan dari salah satu materi sejarah untuk *enrichment*, digunakan metode (khas) sejarah yang meliputi tahapan-tahapan pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber, interpretasi (penafsiran dan eksplansi), serta penulisannya (historiografi). Sementara itu, untuk melihat kelayakan dan relevansi dari hasil pengembangan materi sejarah tersebut selain akan dilakukan wawancara, juga observasi di kelas selama pembelajaran berlangsung.

Pada Bab IV ‘Hasil Penelitian dan Pembahasan’ terbagi dalam tiga bagian, yaitu: *pertama* ‘Upaya Bangsa Indonesia (Yogyakarta) dalam kancah revolusi kemerdekaan tahun 1945-1950’, berkaitan dengan hasil rekonstruksi dalam mengembangkan materi ajar sejarah untuk *enrichment* pembelajaran sejarah di SMA. Pengembangan materi menyangkut: gambaran umum Kasultanan dan Pakualaman; integrasi ke dalam negara kesatuan Indonesia; Yogyakarta sebagai ibukota RI; berikutnya adalah Peristiwa Enam Jam di Yogya 1 Maret 1949; pemerintahan transisi RI di Yogyakarta; dan bagian terakhir adalah menuju pengakuan kedaulatan. *Kedua*, ‘Kelayakan sebagai *enrichment* pembelajaran sejarah di Sekolah Menengah Atas’; berisi tentang hasil wawancara dengan guru sejarah dan siswa dari SMA Negeri 8 Yogyakarta. Hal ini dilakukan untuk melihat keluasan dan kedalaman materi yang telah dikembangkan oleh peneliti beserta pembahasannya. *Ketiga*, ‘Perencanaan dan pembelajaran sejarah di SMA Negeri 8 Yogyakarta’, berkaitan dengan implemetasi pembelajaran sejarah dengan materi yang telah dikembangkan sebelumnya mulai dari perencanaan hingga evaluasi beserta pembahasannya. Hal ini dilakukan untuk melihat relevansi

materi sejarah yang telah diembankan peneliti sebagai *enrichment* pembelajaran sejarah di SMA.

Terakhir, pada Bab V ‘Kesimpulan, Implikasi, Rekomendasi dan Teori’ berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan. Diuraikan berbagai simpulan dari hasil penelitian, implikasi bagi pembelajaran di sekolah antara lain berkaitan dengan kurikulum, pelaksanaan KBM di kelas, rujukan bagi guru dan kemungkinan lainnya. Saran atau rekomendasi lebih ditujukan kepada guru sejarah, instansi terkait (sekolah, perguruan tinggi, dan kementerian), serta peneliti sendiri tentang perlunya dilakukan pengembangan materi ajar sebagai *enrichment* pembelajaran sejarah di SMA. Sementara itu, teori dalam konteks penelitian ini adalah sejumlah pendapat peneliti yang didasarkan pada hasil penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi dari peneliti.